



Implementasi Kebijakan *Blue Economy* dalam Pemberdayaan Masyarakat di Pantai Wini, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara

Vinsensius Naikteas^{1*}, Fransina W. Ballo², Cicilia A. Tungga³

¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Indonesia

*Penulis Korespondensi: vinsensiusnaikteasvence@gmail.com

Abstract. *This study explores the implementation of Blue Economy policies in Wini Beach, North Insana District, North Central Timor Regency, focusing on the empowerment of coastal communities. Using a qualitative approach, this study analyzes marine potential, the implementation of conservation areas, and the economic and social impacts of Blue Economy. The results indicate that this approach, which includes sustainable fishing practices, ecotourism development, and technical training, has improved the income and well-being of coastal communities. The introduced fishermen's training program successfully introduced environmentally friendly fishing techniques, while ecotourism promotion attracted tourists and created new job opportunities. However, challenges such as the lack of facilities, funding, and technical knowledge still persist. This study recommends enhancing collaboration between the government, NGOs, and local communities to address these challenges. In the three villages (Wini, Oesoko, Oekolo), the findings show that Blue Economy effectively enhances community welfare and environmental sustainability. However, challenges such as the lack of technical knowledge and infrastructure remain obstacles. Recommendations include increased training, infrastructure support, and regular evaluations to ensure long-term sustainability.*

Keywords: *Blue Economy; Community Empowerment; Ecotourism; Marine Conservation; Sustainable Fishing.*

Abstrak. Penelitian ini mengeksplorasi implementasi kebijakan Blue Economy di Pantai Wini, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat pesisir. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis potensi kelautan, implementasi kawasan konservasi, serta dampak ekonomi dan sosial dari Blue Economy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini, yang mencakup praktik perikanan berkelanjutan, pengembangan ekowisata, dan pelatihan teknis, telah meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Program pelatihan nelayan yang diperkenalkan berhasil memperkenalkan teknik penangkapan ramah lingkungan, sementara pengembangan ekowisata menarik wisatawan dan menciptakan lapangan kerja baru. Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi termasuk kurangnya fasilitas, dana, dan pengetahuan teknis. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan masyarakat untuk mengatasi tantangan tersebut. Di tiga desa (Wini, Oesoko, Oekolo), hasil penelitian menunjukkan bahwa Blue Economy efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Namun, tantangan seperti kurangnya pengetahuan teknis dan infrastruktur masih menjadi kendala. Rekomendasi mencakup peningkatan pelatihan, dukungan infrastruktur, dan evaluasi berkala untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang.

Kata Kunci: *Blue Economy; Ekowisata; Konservasi Laut; Pemberdayaan Masyarakat; Perikanan Berkelanjutan.*

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang sejak Deklarasi Djuanda (1957) menegaskan kedaulatannya sebagai negara maritim, dan kemudian diperkuat melalui Konvensi Hukum Laut PBB (*United Nation Convention on the Law of the Sea/UNCLOS*). Dengan lebih dari 17.500 pulau, garis pantai sepanjang 81.000 km, serta perairan seluas 6,32 juta km² (62% dari total wilayah), Indonesia memiliki kekayaan sumber daya laut yang sangat potensial, khususnya dalam sektor perikanan (KKP, 2021). Potensi tersebut terbukti melalui pertumbuhan ekspor hasil perikanan, di mana berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS)

yang diolah Ditjen PDSPKP, nilai ekspor meningkat 8,12% pada Januari–November 2016–2017, dari USD 3,78 miliar menjadi USD 4,09 miliar. Hal ini menegaskan bahwa sektor kelautan dan perikanan tidak hanya berperan strategis bagi ekonomi nasional, tetapi juga berkontribusi terhadap ketahanan pangan, lapangan kerja, dan peningkatan devisa negara.

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu wilayah kepulauan dengan potensi kelautan dan perikanan yang melimpah. Namun, kondisi tersebut tidak sepenuhnya berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan nelayan. Salah satu indikator yang digunakan untuk menilai daya beli nelayan adalah Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Usaha Nelayan (NTUN). Data BPS Provinsi NTT tahun 2019–2021 menunjukkan bahwa NTN dan NTUN konsisten berada di bawah angka 100. Situasi ini merefleksikan rendahnya kemampuan hasil produksi nelayan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga maupun biaya operasional usaha. Dengan kata lain, meskipun sumber daya laut melimpah, masyarakat pesisir belum menikmati manfaat ekonomi secara optimal.

Fenomena ketimpangan antara potensi sumber daya kelautan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat menuntut adanya paradigma pembangunan baru yang berorientasi pada keberlanjutan. Salah satu konsep yang relevan adalah *Blue Economy*, yaitu pendekatan pembangunan ekonomi yang menekankan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan tanpa eksploitasi berlebihan, serta mengintegrasikan aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi (Nurhayati, 2013). Model pembangunan ini didasarkan pada empat pilar utama: (1) integrasi pembangunan daratan dan kelautan, (2) pembangunan yang bersih, inklusif, dan berkelanjutan, (3) peningkatan nilai tambah dan daya saing melalui inovasi, serta (4) pemerataan kesejahteraan masyarakat (Rani & Cahyasari, 2015). Dalam konteks nasional, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia juga menegaskan *Blue Economy* sebagai salah satu prinsip dasar pembangunan kelautan, bersama dengan wawasan nusantara, pembangunan berkelanjutan, tata kelola yang transparan, serta pemerataan.

Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), khususnya Kecamatan Insana Utara dengan pusat pesisir di Pantai Wini, merupakan salah satu kawasan strategis di Provinsi NTT yang menyimpan potensi kelautan cukup besar. Selain penghasil garam, kawasan ini juga memiliki hasil perikanan tangkap yang melimpah. Dengan luas wilayah 333,08 km² dan populasi 20.890 jiwa (BPS, 2020), Insana Utara memiliki tiga desa pesisir yang menggantungkan hidup pada hasil laut, yakni Desa Humusu Oekolo, Oesoko, dan Humusu Wini. Namun demikian, angka kemiskinan di NTT masih tinggi. Pada tahun 2020, tercatat 386.990 jiwa penduduk miskin (22,28% dari total penduduk), dengan indeks kedalaman kemiskinan 3,75 dan keparahan

kemiskinan 0,90. Meskipun lebih rendah dari rata-rata provinsi, data ini tetap menunjukkan kerentanan sosial-ekonomi masyarakat pesisir, termasuk nelayan di Pantai Wini.

Penelitian terdahulu menunjukkan potensi besar penerapan *Blue Economy* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Setyawati dkk. (2021) menekankan pentingnya pemanfaatan potensi kelautan Pantai Wini melalui kebijakan *Blue Economy* yang mendorong konservasi laut, pengelolaan perikanan berkelanjutan, serta peran hukum adat dalam mengatur penggunaan alat tangkap ramah lingkungan. Sementara itu, penelitian Purbani dkk. (2021) di Sumatera Barat menunjukkan perlunya inovasi teknologi tepat guna dalam penangkapan dan pengolahan hasil laut untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk perikanan. Namun, studi-studi tersebut masih terbatas dalam melihat implementasi kebijakan secara langsung pada konteks lokal yang spesifik, terutama terkait dengan pemberdayaan masyarakat pesisir melalui *Blue Economy*.

Berdasarkan kondisi tersebut, Pantai Wini di Kecamatan Insana Utara menjadi kawasan yang relevan untuk dikaji lebih dalam. Penerapan *Blue Economy* diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui pemanfaatan potensi perikanan secara berkelanjutan, peningkatan keterampilan masyarakat, pembangunan infrastruktur pendukung, serta pengembangan industri berbasis hasil laut. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis implementasi kebijakan *Blue Economy* dalam pemberdayaan masyarakat pesisir Pantai Wini, Kabupaten Timor Tengah Utara, sekaligus menjawab tantangan ketimpangan antara kekayaan sumber daya laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Ekonomi Pembangunan

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu fokus utama dalam studi pembangunan, di mana berbagai teori telah diformulasikan untuk menjelaskan mekanisme pertumbuhan dan transformasi sosial-ekonomi suatu negara. Todaro (1994; 2000) serta Kuncoro (2006; 2010) mengelompokkan teori pembangunan ke dalam beberapa pendekatan utama yang hingga kini masih menjadi rujukan penting.

Pertama, teori pertumbuhan linear menekankan pembangunan sebagai proses bertahap dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Adam Smith melihat pembagian kerja, akumulasi modal, dan spesialisasi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi, sementara Karl Marx menekankan dinamika konflik kelas antara pemilik modal dan buruh dalam proses transisi dari feodalisme menuju kapitalisme dan sosialisme. Berbeda dengan keduanya, Rostow

memformulasikan pembangunan ke dalam lima tahap evolusi, mulai dari ekonomi tradisional hingga konsumsi massal.

Kedua, teori perubahan struktural yang dipelopori oleh Hollis Chenery menyoroti pergeseran struktur ekonomi negara sedang berkembang dari basis pertanian ke industri dan jasa. Transformasi ini diyakini sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita dan modernisasi kelembagaan.

Ketiga, teori dependensia berangkat dari pengalaman negara-negara Amerika Latin yang melihat keterbelakangan ekonomi sebagai akibat dari ketergantungan struktural pada negara maju. Dalam kerangka ini, keterbelakangan bukanlah tahap evolusi, melainkan konsekuensi dari relasi ekonomi global yang timpang antara pusat dan periferi.

Keempat, muncul teori neo-klasik yang menolak pendekatan dependensia dengan menekankan pentingnya mekanisme pasar bebas. Teori ini merekomendasikan privatisasi, perdagangan bebas, dan minimnya intervensi pemerintah untuk menciptakan efisiensi serta mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Kelima, teori pertumbuhan baru (endogen) memberikan kerangka yang lebih mutakhir dengan menekankan peran modal manusia, inovasi, dan pengetahuan dalam menjelaskan pertumbuhan jangka panjang. Berbeda dengan teori neo-klasik yang melihat pertumbuhan dipengaruhi faktor eksogen, teori ini menegaskan bahwa investasi dalam pendidikan, riset, dan penguasaan teknologi dapat menciptakan *increasing returns to scale* yang berkelanjutan.

Kerangka teoretis ini relevan bagi penelitian mengenai implementasi kebijakan *Blue Economy*, karena pembangunan berbasis maritim tidak hanya membutuhkan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga transformasi struktural, pengelolaan berkelanjutan, serta partisipasi masyarakat pesisir dalam memanfaatkan potensi sumber daya laut secara adil dan berkesinambungan.

Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Pertumbuhan ekonomi wilayah dipahami sebagai peningkatan pendapatan total yang tercermin dari kenaikan nilai tambah suatu daerah. Boediono (1985) menekankan bahwa pertumbuhan harus melebihi laju pertumbuhan penduduk agar terjadi peningkatan output per kapita secara berkelanjutan.

Dalam literatur, terdapat dua teori utama yang relevan. Pertama, teori ekonomi klasik yang dikemukakan Adam Smith (1723–1790), menekankan peran kebebasan pasar dan mekanisme *invisible hand* dalam mendorong efisiensi, pertumbuhan, serta pencapaian kondisi *full employment* hingga mencapai posisi stasioner. Kedua, teori Harrod–Domar yang lahir dari pengembangan gagasan Keynes. Teori ini melihat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang

hanya dapat berkelanjutan apabila terjadi keseimbangan antara laju pertumbuhan output, modal, dan tenaga kerja ($g = k = n$). Perspektif ini memberikan kerangka analisis mengenai keterkaitan antara investasi, kapasitas produksi, serta serapan pasar dalam dinamika pembangunan wilayah.

Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan tahap penting dalam siklus kebijakan publik karena menjadi penghubung antara keputusan formal dengan hasil nyata di lapangan. Menurut Mulyadi (2015), implementasi mencakup serangkaian tindakan yang bertujuan mewujudkan keputusan dalam bentuk program operasional. Proses ini meliputi penyiapan sumber daya, perumusan rencana, pelaksanaan, hingga evaluasi dampak kebijakan.

Berbagai ahli memberikan penekanan yang berbeda. Jones menekankan aktivitas operasional untuk mengefektifkan program, sedangkan Horn dan Meter melihatnya sebagai tindakan kolektif baik individu maupun kelompok yang diarahkan untuk mencapai tujuan kebijakan. Grindle menegaskan dimensi administratif yang dapat dievaluasi pada tingkat program, sementara Mazmanian dan Sabatier memandang implementasi sebagai instrumen hukum dan eksekutif dalam menyelesaikan masalah publik. Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi meliputi kualitas kebijakan, kecukupan sumber daya, kapasitas organisasi pelaksana, dukungan kelompok sasaran, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik (Purwanto dalam Syahida, 2014).

Konsep *Blue Economy*

Konsep *Blue Economy* pertama kali diperkenalkan oleh Gunter Pauli (2010) sebagai pendekatan pembangunan ekonomi berbasis pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. *Blue Economy* menekankan efisiensi, inovasi, serta pengelolaan limbah yang ramah lingkungan, dengan prinsip utama menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian ekosistem (Ilma, 2014; Kiak & Ratu, 2023).

Dalam konteks Indonesia, *Blue Economy* sejalan dengan RPJPN 2005–2025 dan RPJMN 2020–2024 yang menempatkan pembangunan maritim sebagai pilar utama. Konsep ini diarahkan untuk mengoptimalkan potensi kelautan dalam menghadapi tantangan degradasi lingkungan, perubahan iklim, polusi, serta kerentanan sosial-ekonomi masyarakat pesisir.

Prinsip dasar *Blue Economy* meliputi: (1) memberikan manfaat ekonomi dan sosial lintas generasi; (2) menjaga ekosistem laut dan keanekaragaman hayati; (3) mendorong teknologi bersih dan energi terbarukan; (4) menjamin inklusivitas partisipasi; (5) berbasis pada pengetahuan ilmiah; (6) akuntabel dan transparan; (7) bersifat holistik dan lintas sektor; serta (8) inovatif dan proaktif. Prinsip-prinsip ini tidak hanya menegaskan relevansi *Blue Economy*

bagi keberlanjutan lingkungan, tetapi juga menempatkan masyarakat pesisir sebagai aktor kunci dalam pembangunan ekonomi maritim.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) melalui studi kasus. Tujuan utamanya adalah memahami implementasi kebijakan *Blue Economy* dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di pesisir Pantai Wini, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, serta mengidentifikasi aspek alternatif prioritas strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Fokus penelitian diarahkan pada peran pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi dan analisis strategi yang dapat menjadi prioritas kebijakan di wilayah tersebut.

Data penelitian diperoleh melalui kombinasi data primer dan sekunder. Data primer dihimpun dari wawancara dan observasi langsung terhadap pemerintah serta masyarakat nelayan di tiga desa pesisir (Desa Humusu Oekolo, Desa Oesoko, dan Desa Humusu Wini). Data sekunder berasal dari dokumen resmi seperti publikasi pemerintah, laporan Dinas Perikanan dan Kelautan, serta Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *snowball sampling*, melibatkan aparat pemerintah (camat, kepala desa, instansi teknis) hingga masyarakat desa.

Pengumpulan data menggunakan tiga metode utama, yaitu observasi partisipatif untuk memahami aktivitas masyarakat, wawancara terstruktur dengan panduan pertanyaan yang telah disiapkan, serta dokumentasi berupa foto, rekaman, dan dokumen pendukung. Analisis data dilakukan dengan teknik triangulasi (sumber, metode, dan teori) untuk meningkatkan validitas hasil penelitian, memastikan konsistensi informasi, serta memperkaya interpretasi temuan.

Dengan metode ini, penelitian berupaya menyajikan gambaran holistik tentang praktik pemberdayaan ekonomi berbasis kebijakan *Blue Economy* di Pantai Wini, sehingga dapat memberikan kontribusi teoretis maupun praktis bagi pengembangan strategi pembangunan masyarakat pesisir.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Potensi Kelautan yang Bisa di Kembangkan oleh Masyarakat Pantai Wini

Penelitian mengenai implementasi kebijakan *Blue Economy* di Pantai Wini, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, menunjukkan bahwa masyarakat pesisir memiliki beragam potensi kelautan yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan

kesejahteraan sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. Potensi utama meliputi sektor perikanan tangkap, budidaya laut (ikan kerapu dan udang), pengolahan hasil laut, serta pariwisata bahari yang berbasis pada keindahan alam dan kearifan lokal.

Wawancara dengan Bapak Domi, masyarakat Desa Wini, menegaskan pentingnya pengelolaan laut berkelanjutan: *“Penekankan fokus pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, terutama melalui pengelolaan ikan dan pengembangan wisata bahari... tujuan utama adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak lingkungan.”* Pandangan ini menunjukkan adanya kesadaran lokal akan prinsip keberlanjutan, sejalan dengan konsep *Blue Economy*.

Hasil serupa juga tampak pada wawancara dengan Bapak Maksi (Desa Oesoko) yang menjelaskan bahwa kebijakan *Blue Economy* diwujudkan melalui konservasi laut, pelatihan nelayan, dan ekowisata berbasis kolaborasi antara pemerintah lokal, LSM, dan masyarakat. Inisiatif ini meningkatkan pendapatan dari ekowisata, namun terkendala keterbatasan teknologi dan fasilitas edukasi, yang kemudian diatasi dengan pelatihan dan dukungan dari LSM.

Bapak Fridus menekankan adanya peningkatan pendapatan di sektor wisata, tetapi menghadapi tantangan minimnya pengetahuan teknis dan peralatan. Ia merekomendasikan pelatihan berkala sebagai solusi strategis. Hal senada diungkapkan Bapak Agus, yang menyoroti tambahan pendapatan dari ekowisata dan hasil tangkapan ikan, namun tetap terbatas oleh infrastruktur dan teknologi, sehingga memerlukan dukungan pemerintah maupun LSM.

Bapak Paul menyoroti praktik perikanan bersih dan wisata alam yang meningkatkan pendapatan sekaligus kualitas hidup masyarakat, namun keterbatasan fasilitas tetap menjadi hambatan. Ia merekomendasikan kerjasama dengan organisasi donor untuk menyediakan peralatan baru. Sementara itu, Bapak Edu menekankan perlindungan habitat laut, pengelolaan sampah, dan teknologi perikanan bersih. Menurutnya, keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada bantuan donor internasional dan program pelatihan.

Temuan ini menunjukkan pola yang konsisten: masyarakat Pantai Wini telah memperoleh manfaat nyata dari kebijakan *Blue Economy*, berupa peningkatan pendapatan, diversifikasi usaha, serta kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga ekosistem laut. Namun, semua narasumber juga menggarisbawahi perlunya dukungan tambahan, baik dalam bentuk infrastruktur, teknologi, pendidikan, maupun kolaborasi dengan pihak eksternal, agar penerapan *Blue Economy* dapat lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, penguatan kapasitas lokal, pendampingan teknis, dan sinergi multipihak menjadi kunci utama untuk mengoptimalkan potensi kelautan Pantai Wini dalam kerangka *Blue Economy*.

Implementasi Kawasan Konservasi dalam Mendukung Keberlanjutan Lingkungan di Pesisir Pantai Wini

Penelitian mengenai implementasi kawasan konservasi dalam mendukung keberlanjutan lingkungan di pesisir Pantai Wini menunjukkan bahwa kawasan konservasi memiliki fungsi strategis sebagai pelindung ekosistem pesisir sekaligus penggerak kesejahteraan masyarakat lokal. Kawasan ini meliputi perlindungan ekosistem penting seperti terumbu karang, mangrove, dan padang lamun yang menjadi habitat berbagai biota laut. Melalui penerapan regulasi mengenai penangkapan ikan dan pengelolaan sumber daya, konservasi berperan mencegah eksploitasi berlebihan, degradasi lingkungan, serta mendorong pemanfaatan laut yang lebih berkelanjutan. Selain itu, kawasan konservasi juga membuka peluang bagi penelitian, pendidikan lingkungan, dan pengembangan ekowisata berbasis masyarakat.

Wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa partisipasi lokal sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan ini. Bapak Sintus menegaskan: *“pentingnya program penyuluhan untuk nelayan dalam rangka mendukung kebijakan Blue Economy... pengembangan resort kecil di daerah tersebut harus melibatkan kerjasama erat antara pemerintah, LSM, dan masyarakat lokal.”* Pandangan ini menekankan penyuluhan sebagai sarana membangun kapasitas nelayan serta kolaborasi multipihak sebagai kunci pemberdayaan.

Sejalan dengan itu, Ibu Marga menyoroti pentingnya budidaya ikan ramah lingkungan: *“pengembangan budidaya ikan merupakan bagian penting dari Blue Economy... perlunya pelatihan teknik perikanan ramah lingkungan untuk memastikan praktik budidaya tidak merusak ekosistem.”* Hal ini menegaskan bahwa konservasi tidak hanya berfokus pada perlindungan, tetapi juga integrasi praktik ekonomi yang lestari.

Ibu Nela menambahkan dimensi pendidikan sebagai elemen vital: *“kegiatan pendidikan tentang praktik perikanan berkelanjutan sangat penting... pengembangan area wisata dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat.”* Sementara itu, Ibu Yustina menekankan pentingnya kolaborasi: *“kerjasama antara semua pihak terkait dalam implementasi Blue Economy... fokus lebih diberikan pada pelatihan untuk meningkatkan dampak positif.”*

Praktik konservasi juga terlihat pada tingkat teknis. Bapak Simon menyoroti pemanfaatan laut ramah lingkungan dan rehabilitasi mangrove yang berdampak pada peningkatan hasil tangkapan ikan serta terbukanya peluang kerja baru, meski terkendala lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Tantangan ini diatasi dengan patroli dan kampanye kesadaran lingkungan. Hal serupa diungkapkan Bapak Rofinus yang menekankan perlunya pelatihan

teknis dan akses peralatan modern sebagai syarat utama agar masyarakat mampu mengelola sumber daya secara efektif.

Bapak Feki menggarisbawahi manfaat sosial-ekonomi konservasi melalui kegiatan pembersihan pantai dan pelatihan nelayan, yang tidak hanya meningkatkan penjualan produk lokal, tetapi juga menurunkan biaya kesehatan akibat berkurangnya pencemaran. Kendala berupa keterbatasan fasilitas pengolahan limbah dan pemahaman masyarakat diatasi dengan pembangunan fasilitas baru serta edukasi tambahan. Ibu Santi juga menegaskan bahwa keberlanjutan ekonomi dapat dicapai dengan pelatihan teknik perikanan berkelanjutan yang meningkatkan peluang ekonomi sekaligus kualitas hidup masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa implementasi kawasan konservasi di Pantai Wini memberikan dampak ganda, yakni menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Namun, tantangan berupa keterbatasan teknologi, infrastruktur, dan kapasitas masyarakat masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, keberhasilan program konservasi sangat bergantung pada kombinasi tiga faktor: (1) kolaborasi erat antara pemerintah, LSM, dan masyarakat, (2) peningkatan kapasitas melalui penyuluhan dan pelatihan, serta (3) dukungan fasilitas, teknologi, dan penegakan hukum. Dengan demikian, kawasan konservasi di Pantai Wini dapat menjadi model sinergi antara pelestarian lingkungan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasis *Blue Economy*.

Dampak Blue Economy terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai Wini

Penerapan konsep *Blue Economy* di Pantai Wini memberikan dampak signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat pesisir, khususnya dalam diversifikasi sumber penghidupan, peningkatan kesejahteraan, serta kesadaran terhadap pelestarian lingkungan. Program ini mendorong masyarakat untuk beralih dari praktik eksploitasi tradisional menuju pengelolaan sumber daya laut yang lebih berkelanjutan melalui perikanan ramah lingkungan, budidaya laut (*aquaculture*), dan pengembangan ekowisata berbasis alam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memperoleh tambahan pendapatan, keterampilan baru, serta peluang usaha yang lebih luas melalui pelatihan dan pendampingan.

Ibu Elis, warga Desa Wini, menyatakan bahwa “*penerapan Blue Economy telah meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat... namun masih ada kendala berupa keterbatasan dana dan fasilitas. Perlu lebih banyak pelatihan dan dukungan teknis untuk meningkatkan efektivitas program.*” Pandangan ini menegaskan bahwa keberhasilan program masih membutuhkan dukungan sumber daya serta fasilitasi berkelanjutan.

Temuan serupa diungkapkan Ibu Santi dari Desa Oesoko yang menekankan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat, meskipun *“tantangan dalam pemahaman teknik perikanan berkelanjutan perlu diatasi melalui program pelatihan dan peningkatan kesadaran.”* Bapak Patris dari Desa Oekolo juga menegaskan pentingnya budidaya ikan sebagai alternatif ekonomi, meski terdapat resistensi awal masyarakat. Menurutnya, resistensi tersebut dapat diatasi melalui *“pelatihan dan demonstrasi manfaat metode baru yang lebih ramah lingkungan.”*

Di sisi lain, implementasi *Blue Economy* juga melibatkan inisiatif sosial-ekologis. Bapak Feki menekankan penggunaan sumber daya laut yang berkelanjutan melalui kegiatan pembersihan pantai dan pelatihan nelayan. Ia menyatakan bahwa upaya ini, yang melibatkan pemerintah desa, LSM, dan komunitas lokal, *“berkontribusi pada peningkatan penjualan produk serta menurunkan biaya kesehatan akibat berkurangnya pencemaran.”* Namun, tantangan berupa kurangnya fasilitas pengolahan limbah dan keterbatasan pemahaman masyarakat tetap menjadi hambatan yang harus diatasi melalui pembangunan infrastruktur baru dan edukasi tambahan.

Bapak Goris menekankan pentingnya kawasan konservasi laut dan program edukasi sebagai bagian dari *Blue Economy*. Upaya ini terbukti meningkatkan kesadaran masyarakat dan memberikan kontribusi ekonomi melalui ekowisata. Ia mengakui keterbatasan infrastruktur konservasi sebagai hambatan utama, sehingga dukungan pihak luar menjadi krusial untuk memastikan keberlanjutan. Hal senada diungkapkan Bapak Elias yang menyoroti keterbatasan teknologi dan pelatihan. Menurutnya, *“penyediaan teknologi baru serta pelatihan tambahan bagi masyarakat sangat penting untuk memaksimalkan potensi Blue Economy dan meningkatkan manfaatnya.”*

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa *Blue Economy* di Pantai Wini tidak hanya memberikan dampak ekonomi berupa peningkatan pendapatan dan diversifikasi usaha, tetapi juga memperkuat kolaborasi multipihak dalam pengelolaan sumber daya serta membangun kesadaran ekologi masyarakat. Namun, keterbatasan infrastruktur, teknologi, serta resistensi terhadap metode baru masih menjadi kendala. Oleh karena itu, penguatan kapasitas melalui pelatihan, penyediaan teknologi tepat guna, serta pembangunan fasilitas pendukung menjadi kunci utama agar implementasi *Blue Economy* benar-benar berkelanjutan dan inklusif.

Pembahasan

Potensi Kelautan Masyarakat Pantai Wini

Masyarakat pesisir Pantai Wini menyimpan potensi kelautan yang sangat besar untuk dikembangkan sebagai sumber peningkatan kesejahteraan sekaligus mendukung ekonomi berkelanjutan. Sektor perikanan masih menjadi kekuatan utama, mengingat ketersediaan berbagai jenis ikan dan biota laut yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Penerapan metode penangkapan ikan yang ramah lingkungan menjadi kunci untuk menjaga keberlangsungan sumber daya tersebut. Selain itu, budidaya komoditas laut seperti kerapu dan udang menjanjikan peluang ekonomi yang besar seiring tingginya permintaan pasar domestik maupun internasional.

Tidak hanya sektor perikanan, pariwisata bahari di Pantai Wini juga memiliki prospek yang cerah. Keindahan panorama pantai, kekayaan ekosistem laut, dan kebudayaan lokal yang unik dapat menjadi daya tarik wisata. Aktivitas seperti snorkeling, menyelam, atau tur perahu tradisional mampu membuka alternatif mata pencaharian baru bagi masyarakat. Dengan demikian, sektor wisata tidak hanya memberi pemasukan tambahan, tetapi juga mendorong masyarakat untuk ikut menjaga kelestarian ekosistem pesisir. Selain itu, produk olahan hasil laut seperti ikan asin, terasi, dan kerupuk udang mempunyai potensi pasar yang luas. Produk-produk tersebut tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan lokal, melainkan juga berpotensi menjadi komoditas ekspor, sebagaimana disampaikan Bapak Domi yang menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat tanpa merusak lingkungan.

Meski demikian, sejumlah tantangan masih membayangi. Menurut Bapak Maksi, langkah awal seperti pembentukan kawasan konservasi laut dan pelatihan bagi nelayan merupakan strategi penting untuk mendukung implementasi *Blue Economy*. Namun, keterbatasan sarana edukasi dan teknologi masih menjadi hambatan utama. Hal senada diungkapkan Bapak Fridus dan Bapak Agus yang menilai bahwa peningkatan pendapatan dari wisata dan hasil tangkapan ikan belum diimbangi dengan ketersediaan infrastruktur dan peralatan yang memadai. Mereka mengusulkan adanya pelatihan berkelanjutan serta akses yang lebih luas terhadap teknologi modern.

Bapak Paul menambahkan bahwa kerja sama dengan lembaga donor perlu ditingkatkan agar masyarakat memperoleh dukungan fasilitas dan peralatan baru. Pendekatan kolaboratif semacam ini diyakini akan memperkuat kapasitas lokal dalam menerapkan praktik perikanan ramah lingkungan dan mengembangkan pariwisata berbasis ekologi. Sementara itu, Bapak Edu menekankan perlunya perlindungan habitat laut dan pengendalian pencemaran melalui

pengelolaan sampah laut. Upaya yang ia lakukan, dengan dukungan donor internasional dalam bentuk teknologi perikanan bersih dan pelatihan masyarakat, menunjukkan bahwa bantuan eksternal sangat penting untuk memperkuat hasil sektor perikanan maupun pariwisata lingkungan.

Secara umum, potensi kelautan di Pantai Wini cukup menjanjikan. Akan tetapi, untuk benar-benar memaksimalkan manfaatnya, diperlukan dukungan komprehensif melalui penyediaan infrastruktur, pendidikan, serta kerja sama multipihak. Melalui pendekatan yang berkelanjutan dan melibatkan seluruh unsur masyarakat, Pantai Wini berpeluang menciptakan masa depan yang lebih sejahtera sekaligus menjaga ekosistem laut yang menjadi penopang kehidupan mereka.

Implementasi Kawasan Konservasi di Pesisir Pantai Wini

Penerapan kawasan konservasi di Pantai Wini merupakan langkah strategis untuk memastikan keseimbangan ekologi sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir. Kawasan ini berfungsi sebagai pelindung bagi ekosistem yang kaya dengan keanekaragaman hayati—mulai dari terumbu karang, mangrove, hingga padang lamun—serta menjadi wahana pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sumber daya laut secara bijak. Dengan adanya regulasi konservasi, dampak negatif dari penangkapan ikan berlebihan maupun pencemaran dapat diminimalisasi, sehingga sumber daya laut tetap terjaga untuk generasi mendatang. Sejalan dengan pandangan Bapak Sintus, edukasi kepada nelayan mengenai praktik tangkap dan budidaya yang berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan program ini.

Pendidikan dan pelatihan terbukti memainkan peran penting. Ibu Marga menekankan pentingnya teknik perikanan ramah lingkungan sebagai bagian dari implementasi *Blue Economy*, yang menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap prinsip berkelanjutan harus terus diperkuat. Di sisi lain, kawasan konservasi juga berpotensi menjadi pusat ekowisata. Dengan membangun infrastruktur pendukung, ekowisata dapat memberikan pendapatan tambahan bagi masyarakat, sebagaimana disampaikan Ibu Nela yang menekankan perlunya keterlibatan pemerintah dan LSM dalam pengembangan wisata sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat.

Meski begitu, beberapa kendala tetap ada. Bapak Simon menyoroti lemahnya pengawasan serta penegakan hukum di lapangan, sehingga keberlanjutan program konservasi sering kali tidak konsisten. Oleh karena itu, pelibatan masyarakat dalam patroli, kampanye lingkungan, dan kegiatan pengawasan menjadi langkah penting. Hal ini sejalan dengan pandangan Ibu Yustina yang menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, organisasi

non-pemerintah, dan masyarakat lokal dalam memperkuat konservasi. Melalui peningkatan kapasitas dan pelatihan, tujuan keberlanjutan dapat lebih mudah tercapai.

Dengan demikian, implementasi kawasan konservasi di Pantai Wini bukan hanya menjaga kelestarian lingkungan, melainkan juga membuka ruang sinergi antara upaya pelestarian sumber daya alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan kolaboratif dan komprehensif ini diyakini akan memberikan manfaat jangka panjang, baik bagi ekosistem laut maupun masyarakat yang hidup bergantung padanya.

Dampak Blue Economy terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Kebijakan *Blue Economy* yang dijalankan di Pantai Wini telah menunjukkan pengaruh nyata dalam memberdayakan masyarakat pesisir. Prinsip utamanya adalah pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, sehingga kesejahteraan ekonomi dapat tercapai tanpa mengorbankan ekosistem. Salah satu hasil yang paling menonjol adalah peningkatan pendapatan masyarakat berkat diversifikasi usaha, mulai dari perikanan berkelanjutan, budidaya laut, hingga pariwisata berbasis alam. Program pelatihan dan pendidikan terkait teknik perikanan ramah lingkungan turut membantu masyarakat mengadopsi metode yang lebih efisien. Seperti yang diungkapkan Ibu Elis, *“meskipun pendapatan masyarakat meningkat, kendala berupa keterbatasan dana dan fasilitas masih perlu diatasi agar program lebih efektif.”*

Selain meningkatkan hasil tangkapan, *Blue Economy* juga mendorong munculnya inovasi produk olahan laut. Melalui pelatihan keterampilan dan akses teknologi baru, masyarakat mampu menghasilkan produk yang berkualitas dan memiliki daya saing lebih tinggi. Namun, tantangan berupa resistensi terhadap metode baru dan minimnya pemahaman tentang praktik berkelanjutan masih ditemukan. Bapak Patris menekankan bahwa *“pelatihan dan demonstrasi manfaat metode baru sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat.”*

Kolaborasi multipihak menjadi fondasi penting. Pemerintah, LSM, dan komunitas lokal berperan aktif dalam mengelola sumber daya laut. Misalnya, program pembersihan pantai dan pelatihan nelayan yang dipelopori oleh Bapak Feki berhasil meningkatkan penjualan produk lokal sekaligus menekan biaya kesehatan akibat berkurangnya pencemaran. Hal ini membuktikan bahwa edukasi dan kesadaran masyarakat merupakan komponen penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Bapak Goris menambahkan bahwa program edukasi berperan ganda, yakni meningkatkan kesadaran konservasi dan mendorong pertumbuhan ekowisata, meski tantangan berupa keterbatasan infrastruktur masih ada.

Secara keseluruhan, *Blue Economy* di Pantai Wini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya menjaga ekosistem laut. Agar manfaatnya berkelanjutan, investasi dalam bentuk pelatihan, teknologi tepat guna, dan pembangunan infrastruktur pendukung mutlak diperlukan. Dengan demikian, masyarakat pesisir dapat merasakan manfaat ekonomi sekaligus memastikan kelestarian sumber daya laut bagi generasi berikutnya.

Implementasi Kebijakan Blue Economy di Pantai Wini dan Oesoko

Penerapan kebijakan *Blue Economy* di kawasan pesisir Pantai Wini dan Oesoko memperlihatkan hasil yang signifikan, baik dalam aspek pemberdayaan masyarakat maupun dalam pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan. Konsep ini tidak hanya menitikberatkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga mengintegrasikan dimensi sosial, budaya, dan lingkungan. Pendekatan tersebut membuktikan bahwa kesejahteraan masyarakat dapat dicapai bersamaan dengan upaya menjaga kelestarian ekosistem laut yang menjadi penopang kehidupan.

a. Memberikan Manfaat Sosial dan Ekonomi

Hasil wawancara menunjukkan bahwa *Blue Economy* telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat. Bapak Domi (Desa Wini) menekankan bahwa pengelolaan sumber daya laut berbasis keberlanjutan, seperti penangkapan ikan dengan metode ramah lingkungan serta pengembangan wisata bahari, berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak ekosistem. Hal serupa diungkapkan Bapak Maksi (Desa Oesoko), yang melihat bagaimana pengembangan ekowisata secara langsung membuka peluang kerja baru dan meningkatkan pendapatan. Kondisi ini sejalan dengan prinsip dasar *Blue Economy* yang menekankan pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan generasi kini tanpa mengorbankan potensi generasi mendatang.

b. Menjaga Ekosistem Laut

Aspek penting dari kebijakan ini adalah perlindungan ekosistem pesisir. Bapak Edu dan Bapak Sintus menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi laut terbukti mampu menjaga keberlangsungan ekosistem penting, seperti mangrove, terumbu karang, dan padang lamun. Program konservasi tersebut bukan hanya melestarikan keanekaragaman hayati, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan ekowisata, yang akhirnya berdampak positif terhadap pendapatan masyarakat. Keberhasilan kawasan konservasi di Pantai Wini, misalnya, menjadi contoh bahwa pelestarian lingkungan dan peningkatan ekonomi dapat berjalan beriringan.

c. Mempromosikan Teknologi Bersih dan Energi Terbarukan

Salah satu tantangan utama dalam implementasi *Blue Economy* adalah keterbatasan teknologi. Bapak Agus dan Ibu Marga menilai bahwa sarana dan peralatan yang tidak memadai masih menjadi hambatan. Untuk menjawab persoalan tersebut, kolaborasi dengan pihak eksternal dilakukan. Bapak Paul dan Bapak Feki mengungkapkan bahwa dukungan berupa pelatihan, teknologi perikanan ramah lingkungan, serta peralatan efisien dari lembaga donor sangat membantu masyarakat dalam mengelola sumber daya laut secara lebih efektif. Inovasi teknologi bersih ini sejalan dengan prinsip *Blue Economy* yang menekankan efisiensi, pengurangan limbah, serta pemanfaatan energi terbarukan.

d. Inklusif dan Kolaboratif

Keberhasilan penerapan kebijakan ini tidak terlepas dari kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan. Bapak Maksi dan Bapak Simon menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, LSM, dan masyarakat lokal menjadi kunci dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan. LSM berperan dalam memberikan pelatihan serta pendidikan, sementara pemerintah berfokus pada penyediaan regulasi dan fasilitas. Sinergi ini memperlihatkan bahwa pengelolaan sumber daya laut bukanlah tanggung jawab satu pihak, melainkan hasil kolaborasi yang inklusif.

e. Pendidikan dan Pengetahuan

Pendidikan menjadi pilar penting dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Ibu Marga dan Ibu Nela menekankan pentingnya program pelatihan teknik perikanan ramah lingkungan, baik untuk nelayan maupun masyarakat umum. Dengan adanya transfer pengetahuan, masyarakat semakin memahami hubungan antara aktivitas mereka dengan keberlangsungan lingkungan. Pendidikan ini pada akhirnya membangun kesadaran kolektif bahwa keberlanjutan adalah bagian dari tanggung jawab bersama.

f. Holistik, Lintas Sektor, dan Jangka Panjang

Penerapan *Blue Economy* bersifat multidimensional. Bapak Simon terlibat dalam program rehabilitasi hutan mangrove, sementara Bapak Feki aktif dalam kampanye kebersihan pantai. Kedua kegiatan tersebut memperlihatkan bagaimana pendekatan lintas sektor mampu menghasilkan solusi yang menyeluruh. Masyarakat tidak hanya diajak untuk mengelola perikanan, tetapi juga menjaga kualitas ekosistem secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

g. Inovatif dan Proaktif

Inovasi merupakan elemen lain yang menonjol. Bapak Fridus dan Bapak Patris menjelaskan bahwa adopsi teknik baru dalam pengelolaan wisata dan perikanan terbukti mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Memang terdapat resistensi awal terhadap metode baru, tetapi melalui pelatihan berkala dan demonstrasi nyata, masyarakat mulai menerima serta mengadopsinya. Pendekatan ini membuktikan bahwa inovasi dan sikap proaktif dalam menghadapi tantangan adalah kunci keberhasilan *Blue Economy*.

h. Akuntabilitas dan Transparansi

Keterbukaan informasi dan kejelasan program juga ditekankan dalam wawancara. Bapak Elias dan Ibu Elis menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap implementasi. Masyarakat perlu mengetahui manfaat program, potensi keuntungan, serta dukungan yang tersedia agar mereka lebih percaya dan terlibat aktif. Hal ini memperkuat legitimasi program dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan *Blue Economy*.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Implementasi *Blue Economy* di Desa Wini, Oesoko, dan Oekolo menunjukkan bahwa potensi kelautan seperti perikanan berkelanjutan, budidaya ikan, dan pariwisata bahari dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian sumber daya laut. Penerapan kawasan konservasi menjadi strategi penting dalam menjaga ekosistem, dengan melibatkan masyarakat serta memberikan pelatihan yang relevan bagi nelayan. Kebijakan ini terbukti berdampak positif terhadap pemberdayaan masyarakat pesisir melalui peningkatan pendapatan, penciptaan peluang kerja baru, dan penguatan partisipasi lokal. Meski demikian, tantangan berupa keterbatasan pengetahuan teknis dan infrastruktur masih perlu mendapatkan perhatian agar potensi *Blue Economy* dapat dioptimalkan secara berkelanjutan.

Saran

Untuk memperkuat implementasi *Blue Economy* di Desa Wini, Oesoko, dan Oekolo, beberapa langkah perlu dilakukan. Pertama, meningkatkan kapasitas masyarakat pesisir melalui pelatihan berkelanjutan tentang teknik perikanan ramah lingkungan dan pengelolaan ekowisata, agar nelayan dan pelaku lokal mampu menerapkan praktik berkelanjutan secara efektif. Kedua, membangun infrastruktur pendukung seperti fasilitas pengolahan hasil laut,

pusat informasi wisata, serta penyediaan peralatan yang sesuai, dengan dukungan pemerintah dan LSM. Ketiga, memperluas kerjasama eksternal dengan sektor swasta, organisasi donor, dan lembaga lain guna memperkuat pendanaan, teknologi, serta program keberlanjutan. Keempat, melakukan evaluasi rutin terhadap jalannya program untuk menyesuaikan kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat dan kondisi lapangan. Kelima, memperkuat kesadaran dan edukasi publik mengenai pentingnya keberlanjutan ekosistem laut, sehingga tercipta partisipasi aktif dari seluruh pihak, termasuk masyarakat, pelaku usaha, maupun wisatawan.

DAFTAR REFERENSI

- Adi, I. R. (2008). *Intervensi komunitas pengembangan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat*. PT RajaGrafindo Persada.
- Alfitri. (2011). *Community development: Teori dan aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Ambar, T. S. (2004). *Kemitraan dan model-model pemberdayaan*. Gava Media.
- Anwas, O. (2013). *Pemberdayaan masyarakat di era global*. Alfabeta.
- Badan Pusat Statistik NTT. (2022). *Nilai tukar nelayan provinsi Nusa Tenggara Timur 2021*. Retrieved from <https://ntt.bps.go.id/publication/2022/08/15/9464d2c7249dfbdfbe0fab4b/nilai-tukar-nelayan-provinsi-nusa-tenggara-timur-2021.html>
- Brown, L. M. (2021, September 15). The impact of eco-tourism on coastal communities. *Environmental News*. Retrieved from <https://www.environmentalnews.com/eco-tourism-coastal-communities>
- Bungin, B. (2008). *Analisa data penelitian kualitatif*. Prenada Media Group.
- Edi Suharto. (2005). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat*. PT RajaGrafindo Persada.
- Esrom, A., Aritonang, S. B., & Hegel, T. (2001). *Pendamping komunitas pedesaan*. Sekretariat Bina Desa.
- Faricandy, D. H., & Agunggunanto, E. Y. (2018). *Analisis strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Fernanto, G., Suwaib, A., & Maulana, D. (2022). Efektivitas kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 194–214. <https://doi.org/10.14710/dialogue.v4i1.13659>
- Food and Agriculture Organization (FAO). (2016). *The state of world fisheries and aquaculture 2016: Contributing to food security and nutrition*. Retrieved from <https://www.fao.org/3/a-i5555e.pdf>

- Hassan, R., Scholes, R. J., & Ash, N. (Eds.). (2018). *The economics of ecosystems and biodiversity: Ecological and economic foundations*. Earthscan.
- Ilma, A. F. N. (2014). Blue economy: Keseimbangan perspektif ekonomi dan lingkungan. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 14(1). <https://doi.org/10.20961/jiep.v14i1.2112>
- Kiak, N. T., & Ratu, M. (2023). Blue economy zone development strategy using the pentahelix approach. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(4), 241–263.
- Kuncoro, M. (2010). *Dasar-dasar ekonomika pembangunan*. UPP STIM YKPN.
- Laffoley, D. D. A., & Grimsditch, G. (2009). *The role of marine protected areas in promoting blue growth*. IUCN.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2015). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Alfabeta.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mubyarto. (2002). *Pemberdayaan ekonomi rakyat dan peranan ilmu-ilmu sosial*. Yogyakarta: BPF.
- Payong, V. F., Ilham, M., & Supriadi, B. (2021). Strategi pengembangan sektor perikanan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia*, 13(2), 187–196. <https://doi.org/10.54783/jv.v13i2.425>
- Sjafrizal. (2016). *Perencanaan pembangunan daerah dalam era otonomi*. Rajawali Pers.
- Sufi, S. S. (2019). *Strategi pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan nelayan pada masyarakat pesisir Kecamatan Muara Batu Sulawesi*. Unimal Press.
- Sugiyono. (2005). *Metode penelitian administrasi*. Alfabeta.
- Sumaryadi, I. N. (2005). *Perencanaan pembangunan daerah otonom dan pemberdayaan masyarakat*. Citra Utama.
- Suparjan, & Suyatno, H. (2003). *Pengembangan masyarakat: Dari pembangunan sampai pemberdayaan*. Aditya Media.
- Suryadi, A. M., & Sufi, S. (2019). Strategi pemberdayaan masyarakat nelayan dalam peningkatan kesejahteraan nelayan (Studi di Kantor Camat Muara Batu Kabupaten Aceh Utara). *Negotium: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 2(2), 118–140. <https://doi.org/10.29103/njiab.v2i2.3062>
- Sustainable Development Solutions Network. (2017). *The Sustainable Development Goals Report 2017*. United Nations. Retrieved from <https://unsdsn.org/resources/sdg-report-2017>
- Tarigan, R. (2005). *Ekonomi regional*. PT Bumi Aksara.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Pembangunan ekonomi*. Erlangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Wardhana, M. Y., Makmur, T., & Firnanda, A. (2020). Strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di Desa Meunasah Keude Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar. *Paradigma Agribisnis*, 3(1), 16–23.
<https://doi.org/10.33603/jpa.v3i1.3705>

Wibowo, H., Efri, S. B., & Prayogo, P. H. (2019). *Pemberdayaan ekonomi nelayan: Dari teori ke praktik berbasis PRA (Participatory Rural Appraisal) dan koperasi*. Indeks.

Winardi, J. (2003). *Entrepreneur dan entrepreneurship*. Prenada Media.

Winarni. (1998). *Memahami pemberdayaan masyarakat desa partisipatif dalam orientasi pembangunan masyarakat desa menyongsong abad 21: Menuju pemberdayaan pelayanan masyarakat*. Aditya Media.